



Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Naila Lutfia Agustari^{1*}, Izzatusholekha²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: nailalutfia14@gmail.com^{1*}, izzatusholekha@umj.ac.id²

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia 15419

*Penulis korespondensi

Abstract. *The main issue addressed in this study is the gap between normative policies and actual practices regarding gender mainstreaming (GMS) at the Education Office of Tangerang Regency. The aim of this study is to analyze the implementation of GMS policies using Smith's theory, which includes ideal policy indicators, target groups, implementing organizations, and environmental factors. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The results show that first, the ideal policy is outlined in Regent Regulation No. 10 of 2019; however, it has not been systematically elaborated in the Strategic Plan (RENSTRA) and Work Plan (RENJA) of the Education Office, limiting its implementation. Second, the target groups, such as teachers, students, and the general public, have not fully understood the concept of GMS, as the dissemination of information remains minimal and unfocused. Third, the implementing organization, the Education Office, has not yet optimized coordination in implementing GMS with schools, nor provided comprehensive, specialized training. Fourth, environmental factors, such as strong gender stereotypes, limited gender-friendly facilities, and low public awareness, are significant challenges in the policy's implementation. Based on these findings, it can be concluded that the implementation of GMS policies at the Education Office of Tangerang Regency remains symbolic and requires strengthening of institutions, more intensive socialization, and active involvement of all stakeholders to achieve more optimal success.*

Keywords: *Education; Gender Mainstreaming; Institutional Strengthening; Policy Implementation; Socialization.*

Abstrak. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan praktik di lapangan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan PUG dengan menggunakan teori Smith yang mencakup indikator kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kebijakan yang diidealkan telah tertuang dalam Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2019, namun belum dijabarkan secara sistematis dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan, sehingga implementasinya masih terbatas. Kedua, kelompok sasaran seperti guru, siswa, dan masyarakat umum belum sepenuhnya memahami konsep PUG, karena penyampaian informasi masih sangat minim dan tidak terfokus. Ketiga, organisasi pelaksana, yaitu Dinas Pendidikan, belum optimal dalam mengoordinasikan pelaksanaan PUG dengan sekolah-sekolah, serta belum menyediakan pelatihan khusus yang menyeluruh. Keempat, faktor lingkungan seperti stereotip gender yang masih kuat, keterbatasan fasilitas ramah gender, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PUG di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang masih bersifat simbolik dan memerlukan penguatan kelembagaan, sosialisasi yang lebih intensif, serta pelibatan aktif seluruh aktor yang terlibat untuk mencapai keberhasilan yang lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Kelembagaan; Pendidikan; Pengarusutamaan Gender; Sosialisasi.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan tujuan fundamental dari setiap negara, dan keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif dan setara dari seluruh masyarakat. Salah satu pilar utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah mewujudkan keadilan gender, sayangnya masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Ketimpangan gender sering kali termanifestasi dalam berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi, yang pada akhirnya menghambat potensi sumber daya manusia secara keseluruhan. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), sebuah pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan. Mandat ini secara resmi tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG dalam setiap kebijakan mereka.

Sektor pendidikan memegang peranan krusial dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Sebagai instrumen strategis untuk pembentukan karakter dan pola pikir, pendidikan yang responsif gender mampu menghapus stereotip dan memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Komitmen ini diperkuat oleh peraturan di tingkat kementerian, seperti Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 yang menjadi pedoman untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan. Di tingkat daerah, komitmen serupa juga telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG). Peraturan ini semestinya menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, untuk merancang program yang benar-benar responsif gender. Namun, berdasarkan hasil analisis, masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan.

Dalam membangun pengarusutamaan gender pada bidang pendidikan di kabupaten Tangerang dilihat berdasarkan pencapaian IPM, IPG, dan IDG. Capaian yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten Tangerang yaitu IPM (74,09), IPG (91,69), dan IDG (69,37). Dilihat menurut tabel dibawah ini:

Tabel 1. Angka Indeks IPM, IPG, dan IDG menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	IPM	IPG	IDG
1	Pandeglang	66,99	87,23	70,1
2	Lebak	65,86	81,22	66,83
3	Kab Tangerang	74,09	91,69	69,37
4	Serang	69,03	92,54	60,5

5	Kota Tangerang	80,02	94,95	65,21
6	Kota Cilegon	75,14	88,29	53,69
7	Kota Serang	73,99	92,61	58,38
8	Kota Tangerang Selatan	82,89	94,47	70,59
9	Banten	74,48	92,52	66,48

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang mempunyai nilai IPG yang tinggi tapi tidak dengan nilai IPM nya. Meskipun perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, berbagai faktor seperti norma sosial, tanggung jawab rumah tangga, dan kurangnya dukungan ekonomi dapat menghambat kontribusi mereka terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan yang diperoleh sering kali tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang setara, sehingga potensi mereka tidak sepenuhnya terwujud (Dwi and Prawita 2024).

Indeks Ketimpangan Gender mengukur ketimpangan yang terjadi pada aspek penting dalam pembangunan manusia, salah satunya adalah status ekonomi (Rofatunnisa dan Usman 2024). Kesetaraan gender adalah untuk semua orang dalam kelompok yang berbeda, baik kelas atas dan menengah dan bawah, terlepas dari gender. Setiap orang memiliki hak untuk mempertahankan kesetaraan gender dalam setiap kehidupan-kehidupan mereka. Termasuk dalam bidang pendidikan (Trisnawati dan Widiensyah 2022).

Selanjutnya terdapat angka indeks ketimpangan gender menurut Kabupaten/Kota di provinsi Banten.

Tabel 2. Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Povinsi Banten.

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten		
	2020	2021	2022
Kab Pandeglang	0.580	0.583	0.573
Kab Lebak	0.605	0.626	0.616
Kab Tangerang	0.486	0.457	0.433
Kab Serang	0.563	0.554	0.560
Kota Tangerang	0.279	0.311	0.324
Kota Cilegon	0.338	0.354	0.443
Kota Serang	0.508	0.521	0.544
Kota Tangerang Selatan	0.171	0.155	0.170
Provinsi Banten	0.484	0.475	0.478

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Banten 2022

Dijelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan ketidaksetaraan gender, pemerintah tetap diharapkan untuk terus melaksanakan program-program strategis demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pendidikan. Melalui PUG, diharapkan seluruh komponen pembangunan pendidikan dapat lebih peka terhadap isu-isu gender. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses layanan pendidikan. Selain itu, diharapkan keduanya dapat berpartisipasi secara seimbang, memiliki kendali yang setara atas sumber daya pembangunan, serta mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan. Sebaliknya, kurangnya peran pendidikan dalam menyebarkan pemahaman tentang isu gender dapat memicu bias di masyarakat. Bias ini kemudian menimbulkan pandangan negatif yang merugikan perempuan, yang pada akhirnya melahirkan berbagai stereotip. Kondisi ini menjadi indikasi adanya praktik patriarki yang pada akhirnya berujung pada permasalahan ketidaksetaraan gender (Fajar Ari Nugroho 2022).

Berdasarkan data pada tahun 2021-2024 angka putus sekolah (SMP) terdapat pergerakan naik dan turun pada jumlah laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2021 angka putus sekolah lebih tinggi perempuan dengan jumlah (46), tetapi pada tahun 2024 perempuan sudah turun menjadi (39) artinya pemerintah kabupaten Tangerang sudah mengupayakan isu gender ini namun memang masih belum maksimal. Angka putus sekolah ini dijumlah di tiap-tiap kecamatan wilayah Kabupaten Tangerang (Kemendikbudristek, 2023). Selanjutnya terdapat tingkat putus sekolah pada jenjang (SD). Dilihat dari dua data tabel diatas dari tingkat SD dan SMP. Angka putus sekolah SD meningkat dari (269) pada tahun 2021 menjadi (300) pada tahun 2024 untuk laki-laki. Begitu juga untuk siswi perempuan meningkat dari (231) pada tahun 2021 menjadi (284) pada tahun 2024. Namun dari kedua datanya sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 (Portal Satu Data Kemendikbudristek, 2024).

Berdasarkan isu strategis yang ada di dinas Pendidikan bahwa terdapat Akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 tahun belum merata, menyebabkan masih adanya tiga akar masalah yaitu masih terdapat peserta didik yang putus sekolah, belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dan rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal (Profil Pendidikan, 2023). Kesulitan ekonomi dan tidak terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan merupakan penyebab utama terjadinya putus sekolah pada anak-anak. Banyak anak dari keluarga miskin di Indonesia tidak bersekolah atau memilih untuk keluar dari sekolah, yang disebabkan oleh masalah internal, seperti kurangnya motivasi atau keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Terdapat setidaknya enam alasan yang menjelaskan mengapa siswa

putus sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar. Alasan-alasan tersebut meliputi faktor ekonomi, minat yang rendah terhadap pendidikan, kurangnya perhatian dari orang tua, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, pengaruh budaya, serta jarak atau lokasi sekolah yang jauh (Hidayat 2024).

Tabel 3. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Dan Kab/Kota Di Provinsi Banten.

Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Dan Kab/Kota Di Provinsi Banten				
Jenis Kelamin	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	9,04	9,31	9,32	9,48
Perempuan	7,95	8,28	8,56	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada periode 2021–2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Secara konsisten, RLS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, meskipun keduanya mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, misalnya, RLS laki-laki mencapai 9,04 tahun, sementara RLS perempuan hanya sebesar 7,95 tahun. Selisih ini secara bertahap mengecil, namun pada tahun 2024 masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, yaitu 9,48 tahun untuk laki-laki dan 8,57 tahun untuk perempuan.

Setelah mengidentifikasi data-data diatas, selanjutnya dalam melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender di kabupaten Tangerang. emerintah Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD periode 2019–2023 maupun RKPD. Hal ini terlihat dari masuknya analisis gender dalam isu strategis dan penetapan PUG sebagai indikator kinerja utama. Meskipun demikian, rangkaian perencanaan strategis dan kerja Dinas Pendidikan, yang seharusnya menjadi pedoman teknis, belum secara eksplisit menyebutkan strategi atau indikator PUG. Meski beberapa program dinas, seperti peningkatan akses pendidikan dan beasiswa, secara implisit mendukung kesetaraan gender, integrasi PUG dalam perencanaan teknis dan penganggaran masih belum optimal. Adanya *focal point* PUG yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan diharapkan dapat memperjelas dan menguatkan implementasi kebijakan ini di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun pihak swasta. baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Handayani (2020) menjelaskan bahwa Gender adalah perbedaan yang ada antara pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial dan budaya.

Penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith (1973) dalam Islamy (2001), yang mencakup empat indikator utama, yaitu: (1) kebijakan yang diidealkan, (2) kelompok sasaran, (3) organisasi pelaksana, serta (4) lingkungan. Model ini digunakan untuk melihat bagaimana substansi kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik di tingkat pelaksana, termasuk tantangan struktural dan kultural dalam penerapannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik meliputi wawancara mendalam dengan informan di Dinas Pendidikan dan sekolah, observasi lapangan, serta dokumentasi kebijakan dan program terkait PUG. Proses analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles dan Huberman, mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Yang Diidealkan (*Idealized Policy*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang telah menunjukkan komitmen normatif terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini tercermin dari adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah PUG (RAD-PUG) dan integrasi isu PUG ke dalam dokumen perencanaan tingkat makro, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, pembahasan lebih lanjut mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara komitmen di tingkat makro dengan implementasi di tingkat operasional. Meskipun ada dasar hukum yang kuat, kebijakan PUG belum dijabarkan secara sistematis dan eksplisit dalam dokumen perencanaan teknis, seperti Perencanaan strategis dan operasional Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Renstra dan Renja. Dengan demikian, PUG gagal terinstitusionalisasi sebagai mekanisme perencanaan yang terarah dan terukur. Implementasi di lapangan cenderung sporadis dan tidak terstruktur, menunjukkan bahwa komitmen politis di tingkat atas belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik manajerial dan operasional yang terukur di tingkat sektoral. Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas institusional untuk menjembatani antara komitmen kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan.

Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dari kelompok sasaran menjadi hambatan mendasar dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kendala ini teridentifikasi pada berbagai lapisan, mulai dari guru, siswa, hingga masyarakat umum. Hal ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam strategi komunikasi dan sosialisasi kebijakan PUG. Minimnya penyampaian informasi yang efektif menyebabkan banyak pihak, termasuk kepala sekolah dan guru, tidak menyadari bahwa program-program harian seperti pengelolaan sekolah, sanitasi, dan beasiswa sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup PUG. Akibatnya, PUG seringkali dianggap sebagai isu yang tidak relevan atau tidak perlu dibesarkan. Kesalahpahaman dan resistensi ini mencerminkan masih kuatnya stereotip dan bias gender di masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai dari para pelaksana di tingkat sekolah, integrasi perspektif gender dalam kegiatan sehari-hari akan sulit terwujud, dan dukungan dari komunitas yang lebih luas pun tidak dapat diperoleh secara optimal.

Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Analisis terhadap hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menghadapi hambatan signifikan dari sisi institusional dan alokasi sumber daya. Meskipun PUG telah menjadi kebijakan formal, pelaksanaannya belum optimal. Dinas Pendidikan sebagai organisasi pelaksana utama belum menunjukkan kinerja yang efektif dalam mengkoordinasikan program ini. Hubungan antara dinas dan sekolah masih belum jelas dan terstruktur, serta tidak adanya surat edaran atau pedoman khusus yang dapat menjadi acuan pelaksanaan PUG di tingkat sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan juga tidak menyediakan pelatihan khusus yang menyeluruh terkait isu gender bagi para guru, sehingga pemahaman dan kapasitas di tingkat pelaksana menjadi minim. Keterbatasan ini diperparah oleh alokasi anggaran yang terbatas. PUG belum dianggap sebagai program prioritas, dan adanya program lain yang dianggap lebih mendesak membuat pendanaan untuk PUG belum menjadi fokus utama. Situasi ini mengindikasikan bahwa komitmen politis di tingkat kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam dukungan alokasi sumber daya dan tata kelola yang kuat. Akibatnya, PUG gagal terinternalisasi sebagai program penting yang membutuhkan perhatian serius dari dinas, sehingga menghambat keberhasilan implementasinya di lapangan.

Faktor Lingkungan (*Environmental Factor*)

Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pendidikan menghadapi tantangan signifikan yang bersumber dari faktor lingkungan, meliputi aspek

budaya, sosial, dan ekonomi. Secara fundamental, pelaksanaan PUG masih terhambat oleh stereotip gender dan norma patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Kondisi ini terus berlangsung meskipun secara normatif kesempatan bagi perempuan sudah lebih terbuka. Tantangan juga muncul dari kurangnya fasilitas sekolah yang ramah gender, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak sepenuhnya mendukung implementasi PUG. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi ini telah menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi PUG. Akibatnya, kebijakan PUG yang telah dirumuskan belum mampu memberikan dampak nyata dan signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas sosial di lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor pendidikan Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan signifikan yang menghambat keberhasilannya. Meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen normatif dari Dinas Pendidikan, terdapat kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas pelaksanaannya. Di tingkat sekolah, PUG belum terintegrasi secara merata. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman guru, kurangnya bahan ajar, serta ketidaksetaraan fasilitas, yang membuat nilai-nilai kesetaraan belum sepenuhnya tercermin dalam budaya dan praktik pendidikan sehari-hari.

Dari sisi organisasi pelaksana, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menunjukkan komitmen, tetapi implementasinya belum terstruktur. Koordinasi antara dinas dan sekolah masih lemah, tidak ada panduan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa PUG belum dianggap sebagai program prioritas yang membutuhkan sumber daya dan perhatian serius. Hambatan ini diperparah oleh faktor lingkungan, seperti norma budaya patriarki dan stereotip gender, yang diperkuat oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan ekonomi.

Kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal ini membuat PUG belum mampu memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya terpadu dan terstruktur, mulai dari penguatan kapasitas pemahaman di tingkat sekolah, perbaikan tata kelola di tingkat dinas, hingga kampanye kesadaran untuk mengubah norma budaya di masyarakat. Dengan demikian, tujuan PUG untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar setara dan inklusif dapat tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan, yakni: (1)Pemerintah kabupaten Tangerang khususnya dinas Pendidikan perlu mengimplementasikan kebijakan perbup nomor 10 tahun 2019 mengenai RAD PUG kepada sekolah ataupun masyarakat secara langsung. (2)Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu meningkatkan aksesibilitas mutu dan fasilitas pendidikan yang mendukung lingkungan belajar yang inklusif dan ramah gender di seluruh sekolah, baik yang ada di perkotaan maupun pedesaan. (3) Dinas Pendidikan perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para guru mengenai pemahaman kesetaraan gender dan bagaimana mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. (4)Sekolah-sekolah perlu lebih membuka diri terhadap isu-isu gender yang menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdoellah Awan, Dkk. 2016. "Buku_Teori_Dan_Analisis_Kebijakan_Publik- 69632009.Pdf."
- Betty, Karya. 2022. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar.
- Dinas Pendidikan. 2023. Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Dinas Pendidikan. 2024. Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Edwards Iii. 1984. Public Policy Implementation.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. 2023. "Handbook Of Public Policy Analysis: Theory, Politics, And Methods." Crc Press.
- Howlett & Ramesh. 1996. "Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystems." Choice Reviews Online 33(10): 33-5970-33-5970
- Moleong. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Tiga puluh. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Pramono, Joko. 2020. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Rulinawati Kasmad, Studi Implementasi Kebijakan Publik, Researchgate

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. Paskarina Mariana. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi).
- Untung, Lasiyono. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ed. Nurhaeni. Sumedang: Cv. Mega Press Nusantara.
- William N. Dunn. 2003. Prentice Hall. *Public Policy Analysis: An Introduction*

Jurnal:

- Aditya Ardiansyah, Aditya (2023) *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat*. Skripsi (S1) thesis, Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Ayissa Tazkia, Listyaningsih, Juliannes Cadith. 2022. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Administrasi Publik* 18(1): 25–44.
- Azmy, Ana Sabhana, And Fini. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Dibidang Pendidikan Di Kota Bogor." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19(2): 160.
- Bella, Alizah. 2023. "Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang." Skripsi.
- Dwi, Cahaya, And Dkk Prawita. 2024. "Peran Pendidikan Dalam Mengurangi Kesenjangan Gender Di Tempat Kerja." 2(1): 531–37.
- Euis Risnawati, Deddy Mulyadi, Edah Jubaedah. 2024. "Jurnal Media Administrasi Terapan Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan." *Media Administrasi Terapan Jmat* 05(1): 1–8
- Fajar Ari Nugroho. 2022. "Bias Gender Dalam Pendidikan Nasional Di Indonesia." (10): 1–44.
- Gusti, Notonagoro Sabdo. 2021. "Implementasi Pendidikan Inklusi Dalam Setting Sekolah Menengah Atas Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal*

Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran 7(3): 532.

Gwijangge, Juliana, And Vince Tebay. 2022. "Implementasi Kebijakan Peran Perempuan Dalam Proses Pembangunan Di Kabupaten Nduga Provinsi Papua." Jurnal Kebijakan Publik 5(2): 102–9.

Harefa Novitasari, Dkk. 2024. "Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan." Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan 11(3): 67–68. Governance.Lkispol.Or.Id.

Hentihu, Vivi Rahim Et Al. 2021. "Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pendidikan." Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS) 4(2): 1014–19.

Hidayat, Mochamad Taufik. 2024. "Strategi Sosialisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Pelajar SMP Di Desa Sukamulya Kecamatan Sukamulya)." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10(8): 665–89.

Ibrahim, Majid. 2022. "Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Anggaran Negara Pada KPPN Karawang Untuk Tahun Anggaran 2020." Skripsi.

INIKE, FIBRIYANTI (2020. 2020. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri Kota." 1: 1–9.

Napitupulu, Sekar Sion. 2022. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara."

Nuzulian, Uly. 2019. "Implementasi Kebijakan Menteri Kesehatan No 29 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit Oleh Pemerintah Desa Semade Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak." (29): 762–79.

Rofatunnisa, Sifa, And Hardius Usman. 2024. "Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel." Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik 14(1): 15–32.

Siti Soleha, Afriyanni. 2021. "Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota

Pekanbaru.” Sorot 16(2): 71.

Trisnawati, Opy, And Subhan Widiensyah. 2022. “Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi.” Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 13(2): 339.

Yulia, D (2022). Pengaruh Patriarki Dalam Pembatasan Akses Pendidikan Perempuan Di Pedesaan Indonesia. *Jurnalkajian Gender*, 9(1), 45-63

Internet:

BPS. (2022). Indeks ketimpangan gender menurut kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/nte3izi=/indeks-ketimpangan-gender-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>

BPS. (2023). Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Banten. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/ntm5izi=/angka-partisipasi-sekolah-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-banten.html>

BPS. (2023). Harapan lama sekolah menurut jenis kelamin di kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/2/mjazizi=/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>

Kemendikdasmen. (2025). Kemendikdasmen. Retrieved from Kemendikdasmen: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikdas/280300/2/jf/5/all>

Kemendikbudristek. (2023). Jumlah siswa putus sekolah menurut jenis kelamin dan tingkat tiap provinsi (Kabupaten Tangerang). Retrieved from Portal Data Pendidikan: <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/11/12-280300/2022/smip-2>